

Pendapat Fraksi-Fraksi: Raperda LP2B Sevgi-nya Dihentikan

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

tidak banyak apabila melaksanakan PTSL, tidak sesuai pemenuhan berfikir, tidak memberi sesuatu apapun kepada petugas BPN Sudojaya, tidak ada biaya tambahan dikur SKB 3 Menteri yakni sebesar Rp150.000, maka mengkritik suatu pernyataan ini maka siap diproses hukum. "Sarat ini sudah disampaikan ke BPN Sudojaya sebagai dasar untuk menjalankan program PTSL di Desa Sudojaya", kata Camat senior di Pemkab Sudojaya ini. [kuncu]

Peran Depan

Dengan adanya rekomendasi dari kementerian, proses pencairan TPP yang ditunggu-tunggu oleh ASN dipastikan cair. Namun, dalam melakukan pencairan kekurangan 50 persen, saat ini pihaknya tengah melakukan

● Ke Halaman 10

Perbaiki Program RTH

pa-ja, meng-
sidoarjo yang
saman alun-
tersebut
dialah oleh
keindahan.
membentuk
melukis
kerjakan
nya.
baru itu
Selin
keindahan,
sebagai
s. Sehingga
yang berhu-
sedang
perusakan or-

pembinaan kemandirian kelompok, mereka harus mampu mengelola proses produksi, pemasaran, pengisian form baka serta minat terlebih dahulu. Baru kemudian disusunkan dalam sidang PTP.

Program Lantuyo Prodi ini akan berlangsung selama 36 bulan, narpadimana dari total 1.549 penghidu. Selain dilakukan penghidu, akan ada juga kelompok rampilan, Lapas Kelai i Surabaya juga memasarkan produknya melalui kelompok rampilan. Selain itu, juga akan ada kelompok pengjualan secara langsung kepada peternak, nasyarak maupun kelompok rampilan. Selain itu, Lapas sering mengikut pameran, juga meningkatkan omset melalui pameran.

Salah satu kelompok adalah Paksi (PNP), urainya.

Berdasarkan data yang dikutip dari kelompok Paksi, 323 orang ini meliputi sebanyak 22 orang laki-laki dan 301 orang perempuan. Karena itu, juga dan jajarannya akan terus berkembang dan berproses. Selain itu, kelompok program kemandirian kelompok juga menjembatani antara kelompok rampilan dan kelompok rampilan.

"Maka kita membangun kelompok rampilan yang bisa menjual yang tidak kalah dengan produk-produk lainnya," pung-

dan PerUndang-Undangan idoarjo



FOTO: NIKEN DUNINGI/W

Pembinaan narapidana Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong guna meningkatkan keterampilan untuk bekal setelah bebas.

Lapas Porong Tingkatkan Keahlian Warga Binaan

Sidoarjo, Memorandum

Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran terus berupaya membekali narapidana (napi) dengan keterampilan. Salah satunya di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong yang memiliki program Latubaya Produktif dengan 15 program unggulan.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengatakan bahwa salah satu amanat kunci dalam UU Pemasyarakatan yang baru adalah peningkatan kualitas pembinaan warga binaan.

"Untuk itu kami dorong 25 lapas jajaran untuk menaikkan standar pembinaan dengan menaikkan status bengkel kerja menjadi balai latihan kerja," ujar Imam.

Peningkatan status tempat pembinaan ini, lanjut Imam, akan dibarengi dengan peningkatan *skill* (keahlian) yang didapatkan dan dimiliki napi.

"Setelah pelatihan berakhir, kami akan mengeluarkan sertifikat keahlian, sehingga ketika bebas nanti warga binaan bisa melampirkannya sebagai bahan pertimbangan saat mencari pekerjaan," urai Imam.

Salah satu lapas yang selama ini *concern* dalam pembinaan keterampilan adalah Lapas 1 Surabaya di Porong. Melalui program Latubaya Produktif, lapas yang dipimpin Jalu Yuswa Panjang itu memberikan pembinaan kemandirian keterampilan kepada seluruh warga binaan guna menciptakan napi yang mandiri, terampil, dan kompeten.

"Sehingga ketika bebas mereka memiliki bekal untuk bekerja maupun berwirausaha ketika selesai menjalani masa pidana," terangnya.

Jalu mengungkapkan bahwa untuk menunjang kegiatan kemandirian keterampilan pihaknya menggandeng beberapa mitra pelatihan dan mitra produksi yang di tandai dengan penandatanganan MoU.

"Kita ada 15 program unggulan Latubaya Produktif sebagai penunjang keterampilan dan kemandirian warga binaan disini," terang Jalu.

"Di bidang wirausaha warga binaan diajari berjualan aneka masakan olahan higienis yang ada di kantin pujasera," sambungnya.

Jalu melanjutkan, sebelum warga binaan mendapatkan pembinaan kemandirian keterampilan mereka harus menjalani proses *assessment* dan pengisian *form* bakat dan minat terlebih dahulu. Baru kemudian di usulkan dalam sidang TPR "Program Latubaya Produktif diikuti sekitar 34 persen napi dari total 1.549 penghuni," urai Jalu.

Selain dilakukan pembinaan kemandirian keterampilan, Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong juga memasarkan produknya melalui mitra produksi, penjualan secara langsung kepada petugas, masyarakat maupun warga binaan. Bahkan pihak lapas sering mengikuti pameran guna meningkatkan omset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Tingkat omset kami sekarang sekitar Rp 323 juta, ini merupakan sebuah peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 273 juta," pungkas Jalu. (aw/jok/nov)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FOTO: MEMORANDUM/ZAENAL

Jalan di Desa Semampir, Kecamatan Sedati terendam air dampak dari banjir rob dan terjadi tiap tiga bulan sekali.

Dilanda Banjir Rob, Jalan Semampir Berubah Jadi Sungai

Sidoarjo, Memorandum

Jalan di Desa Semampir, Kecamatan Sedati mengalami banjir rob tepatnya di wilayah Jalan Semampir. Jalan di desa yang berdekatan dengan Bandara Juanda itu sekitar 1 kilometer tergenang air dan berubah bak sungai.

Kepala Desa Semampir Lukman Muallim mengatakan Jalan Semampir merupakan jalan kabupaten. Ia berharap jalan yang kini jadi sungai itu diperhatikan Pemkab. "Harapan saya pihak terkait segera turun tangan mengatasi banjir rob dan memperbaiki jalan yang rusak karena banjir itu," ucap Lukman.

Sekdes Semampir Khusairi menambahkan jalan kabupaten di wilayah Semampir memang sering terjadi banjir rob. Tiga bulan sekali terjadi bencana tersebut.

Banjir rob sulit ditangani karena dari laut. Air akan berputar meski dibuang ke sungai. Jarak dari laut sekitar 10 km, membuat sungai penuh hingga terjadi banjir rob. "Harapan saya jalan kabupaten segera ditinggikan dan gorong-gorong diberi *box culvert* untuk saluran," pintanya. (zac/jok/nov)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

HEWAN TERNAK

Sebulan, Sapi Terpapar LSD Naik Tiga Kali Lipat

SIDOARJO – Jumlah sapi di Sidoarjo yang terjangkit virus *lumpy skin disease* (LSD) atau penyakit kulit seperti cacar bertambah. Total, ada 169 sapi yang terjangkit. Di antara itu, 15 sapi sudah sembuh. Padahal, bulan lalu hanya 43 ekor sapi yang terjangkit LSD.

Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo drh Tony Hartono mengatakan bahwa kasus LSD di Sidoarjo bertambah. LSD menjangkit hampir di seluruh kecamatan di Sidoarjo. Hanya di Kecamatan Waru yang tidak ditemukan kasus LSD. "Paling banyak ada di Kecamatan Laman. Sampai 74 kasus. Tapi, ada yang sembuh juga 15 ekor," ungkap Tony.

Di kecamatan lain, jumlah sapi yang terjangkit hanya belasan ekor. Bahkan, di Kecamatan Krian dan Jabon masing-masing hanya satu ekor yang terjangkit. Tony menyebut jumlahnya memang bertambah. Namun, tidak secepat penyakit mulut dan kuku (PMK). Bahkan, meski ratusan yang terjangkit, tidak ada satu pun ternak yang mati akibat penyakit tersebut. Yang penting, harus cepat ada penanganan khusus.

Tony menilai, meski ada penambahan kasus, angka di Sidoarjo termasuk rendah. "Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Sidoarjo tidak terlalu tinggi," ucapnya.

Tony menyatakan, upaya menekan persebaran terus dilakukan. Di antaranya dengan vaksinasi LSD, pengobatan hewan sakit, pemberian disinfektan dengan penyemprotan di kandang, isolasi ternak sakit, biosekuriti yang ketat saat keluar masuk kandang, dan harus dilakukan penyemprotan disinfektan.

"Juga ada komunikasi, informasi, dan edukasi ke peternak agar turut melakukan pemberantasan vektor lalat dengan disinfektan yang mematikan lalat," terangnya. Peternak juga tidak perlu takut tertular. Sebab, LSD tidak menular ke manusia. (uzi/c17/any)

Jawa Pos

Renovasi 400 Warung di 6 Kecamatan

KOTA-Program renovasi warung atau bedah warung dilanjutkan tahun ini. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemkab Sidoarjo akan merenovasi 400 unit. Lokasinya tersebar di enam kecamatan.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Ahadi Yusuf mengatakan bahwa 400 warung tersebut terletak di 114 desa. Rinciannya, terdapat 98 warung yang direncanakan akan direnovasi di Kecamatan Taman, 71 warung di Kecamatan Waru, 69 warung di Kecamatan Wonoayu, 62 warung di Kecamatan Gedangan, 60 warung di Kecamatan

Buduran, dan 40 warung di Kecamatan Balongbendo.

Dia berharap tahun ini semua warung sasaran bisa direnovasi. Sebab tahun lalu sebanyak 8 warung gagal direnovasi karena tidak memenuhi syarat program. "Ada masalah dalam kepemilikan saring," katanya.

Dia menjelaskan, warung yang akan direnovasi harus dimiliki oleh warga yang ber-KTP Sidoarjo. Luasnya maksimal 30 meter persegi serta telah beroperasi minimal enam bulan. Penerima bantuan juga tidak berstatus PNS, TNI/Polri.

Yusuf mengatakan, program hibah renovasi warung bertujuan untuk me-

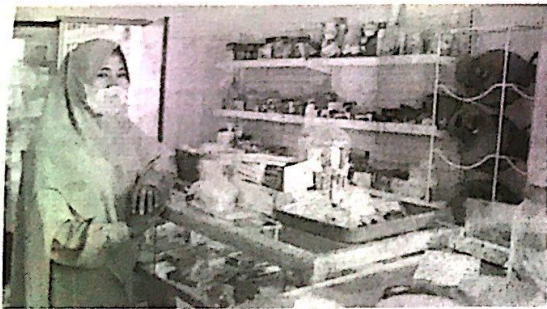
ngangkat usaha ekonomi dari pelaku usaha mikro. Selain itu juga menjadikan warung lebih baik sehingga menarik konsumennya.

Tahun ini bantuan renovasi diperuntukkan bagi warung yang menjual ma-

kanan, minuman, dan kelontong. Renovasi yang wajib dilakukan adalah pengecatan dan memberikan nama atau identitas pada warung tersebut. Sedangkan renovasi pilihan adalah perbaikan lantai,

pintu, dan jendela.

Dia menyebutkan, setiap warung akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 6 juta. Renovasinya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) sekitar. (nis/vga)



LANJUT: Salah satu warung yang mendapatkan bantuan renovasi tahun lalu.

Pemkab Tutup Pintu Gerbang, Pedagang Kuliner di GOR Sidoarjo Berguguran

Ric

Thursday, May 4, 2023, May 04, 2023 WIB



Lihat area gerai pedagang di Gelora Delta Sidoarjo yang sudah hancur karena banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu.

DNN, SIDOARJO – Selayaknya pintu-pintu gerbang GOR Gelora Delta Sidoarjo dibuka seluruhnya demi menghidupkan lagi kawasan itu sebagai destinasi wisata kuliner di kota delta. Dengan begitu para pedagang disana bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris DPC Partai Hanura Sidoarjo, Samsul Hadi usai menerima pengaduan yang disampaikan beberapa perwakilan PKL di lokasi tersebut, Kamis (04/05/2023) malam tadi.

"Lihat saja kondisinya sekarang, sepi. Bahkan lebih sepi daripada kuburan. Informasi yang saya terima dari pedagang, untuk mendapatkan uang Rp 50 ribu sehari saja sudah sangat sulit karena jarang ada pengunjung yang datang," tandasnya

Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) yang membatasi akses keluar-masuk pengunjung ke lokasi tersebut. Dari lima titik pintu gerbang yang ada, hanya ada dua pintu di sisi timur GOR yang dibuka.



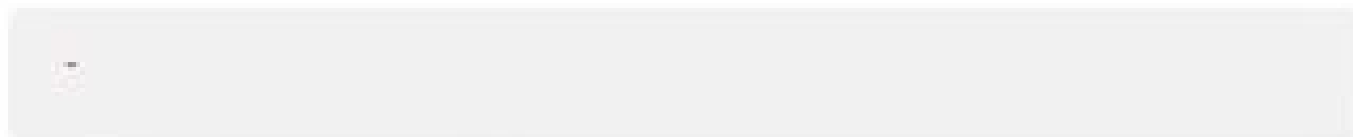
INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Akibatnya, jumlah pedagang makanan yang membuka lapaknya disana terus menyusut. Contohnya kelompok pedagang di Pujasera yang berlokasi di sisi barat bagian selatan GOR. Dalam catatan Samsul ada sekitar 30 container pedagang yang pernah mencoba peruntungannya disana.

Namun saat ini yang masih mampu bertahan hanya tersisa 7 unit saja. Sedangkan yang lainnya memilih tutup karena biaya operasional yang harus mereka keluarkan sudah tak sebanding dengan besaran pendapatan yang dituai setiap harinya.

"Pertimbangannya apa koq membuat kebijakan seperti itu? Apa Pemkab tidak memperhitungkan nasib pedagang disini yang kesulitan. Mereka itu pelaku UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro-red) yang harus difasilitasi dan ditolong," katanya lagi.



Sekretaris DPC Hanura Sidoarjo, Samsul Hadi.

Samsul juga menyoroti tentang fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemkab Sidoarjo disana berupa kursi-kursi dan meja berpayung. Menurutny piranti tersebut menjadi sia-sia lantaran tidak termanfaatkan secara optimal. Bahkan sebagian diantaranya sudah mulai rusak.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Ini semua dibeli dengan menggunakan APBD. Karena itu sudah selayaknya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau kemudian kesempatan pedagang disini justru ditutup, berarti pembelanjaan kursi dan meja ini hanya buang-buang uang rakyat," ucapnya tegas.

Seharusnya, Pemkab memberikan peluang sebesar-besarnya bagi para pengusaha gurem ini untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara membuka pintu-pintu gerbang yang sekarang terkunci rapat itu. "Permintaan pedagang sederhana koq, cukup dibuka mulai jam 3 sore sampai 12 malam. Setelah itu silahkan digembok lagi," imbuh Samsul.

Menurutnya persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah jika Pemkab Sidoarjo benar-benar punya goodwill atau niat baik untuk membesarkan potensi ekonomi kerakyatan demi mensejahterakan masyarakatnya.

"Percuma buang-buang uang melalui program KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri-red) yang gembar-gembornya demi pemberdayaan UMKM, tapi pengusaha kecil yang sudah tumbuh malah dibunuh," pungkasnya.(pram/hans)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pimpinan OPD Belum Kirim Laporan Kinerja Staf, Pencairan TPP 100% Terhambat

Admin

Thursday, May 4, 2023, - May 04, 2023 WIB



Gambar ilustrasi

DNN, SIDOARJO – Hingga saat ini Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi 250 jabatan dari 4.500 ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo belum bisa dicairkan sepenuhnya sekalipun sudah ada persetujuan dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Chusnul Inayah menjelaskan, sebenarnya rekomendasi dari pusat itu sudah turun pada 17 April 2023 lalu. Dan pada hari itu juga keluar juga Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo terkait pencairannya.

Hanya saja 'perintah' pencairan hak bagi para ASN tersebut masih belum bisa dilaksanakan lantaran adanya beberapa kendala. Masalah pertama adalah setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) belum melakukan perhitungan kinerja untuk semua staf pegawainya selama bulan Januari hingga Maret lalu.

Padahal, kata Inayah, data itu sangat diperlukan setiap OPD untuk meminta kepada BPKAD mengeluarkan SPM (surat perintah membayar) pada setiap ASN.

Kendala lainnya adalah mepetnya waktu yang tersisa mengingat mulai 20 April 2023 kemarin, seluruh ASN dan staf di berbagai instansi pelat merah di Indonesia sudah memasuki masa cuti Lebaran selama sepekan penuh.

"Waktunya nggak nutut kalau harus dicairkan semuanya sebelum Lebaran. Apalagi data dari OPD juga belum ada. Terus darimana kami bisa menghitung angka rupiahnya," jelas Inayah yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (04/05/2023) pagi tadi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Karena itu Pemkab membuat kebijakan untuk mencairkan TPP 50% dulu berdasarkan SK Bupati Sidoarjo yang ditandatangani pada 17 April.

Menurutnya langkah itu terbilang aman untuk menghindari kesalahan penghitungan angka rupiah yang dibagikan ke rekening para ASN yang berhak menerima TPP. "Kalau jumlahnya kurang, kan tinggal ditambahkan saja. Tapi kalau sampai lebih, kan kasihan kalau mereka sampai harus mengembalikan ke kas daerah," tambahnya.

Lebih lanjut Inayah meminta pada semua pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk segera membuat dan mengirimkan laporan kinerja para stafnya tersebut ke BPKAD agar bisa mengkalkulasi jumlah TPP sebelum dibagikan.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Arif Mulyono yang dihubungi terpisah mengatakan saat ini pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah mensosialisasikan Perbup terkait pencairan dana TPP itu. "Alhamdulillah BKD sudah mengundang Kasubag Kepegawaian dan Bagian Keuangan di tiap-tiap OPD untuk sosialisasi Perbup itu," ujarnya.

Arif berharap pimpinan OPD tersebut menindaklanjuti Perbup tersebut dengan segera memproses dan melengkapi laporan kinerja pegawainya yang dibutuhkan sebagai persyaratan pencairan dana TPP. "Mudah mudahan dalam minggu ini, atau maksimal minggu depan laporan itu sudah masuk semua. Dengan begitu pekan kedua bulan ini dana TPP sudah diterima 100 persen," pungkasnya. (hans/pram)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Maju Pileg 2024, Ketua Dewan Tetap Lewat Dapil Sidoarjo 1



SIDOARJO (RadarJatim.id) Pemilihan Umum Pemilu) serentak tahun 2024 masih kurang sekitar 10 bulan lagi, namun para Calon Anggota Legislatif (caleg) sudah mempersiapkan diri dan mengatur strategi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. H. Usman, M.Kes, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang rencananya maju lagi pada Pemilu Legislatif (Pileg) pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, memiliki strategi khusus agar terpilih kembali.

H. Usman mengatakan bahwa dirinya akan maju sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pileg 2024 nanti melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 1 yang meliputi Kecamatan Sedati, Buduran dan Sidoarjo kota.

"Salah satunya pemetaan suara, tujuannya untuk mengetahui jumlah suara atau pemilih yang menjatuhkan pilihannya kepada saya pada Pileg (2024) nanti," kata H. Usman, Kamis (04/05/2023).

Selain melakukan pemetaan, ada beberapa lagi strategi khusus yang akan dilakukan dalam meraup suara masyarakat di Dapil Sidoarjo 1 untuk meloloskan dirinya duduk di kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2024 – 2029 nanti.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Tidak mungkin semuanya saya buka di publik, hanya saya dan tim saja yang tahu," ujarnya.

Ia menampik isu terkait dirinya yang akan pindah Dapil ataupun maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang beberapa waktu ini ramai dibicarakan oleh publik Sidoarjo.

"Caleg di Provinsi sudah sesak, Mas," pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo ini diplomatis. (mams)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Bentuk Pansus ke-18 untuk Godok Raperda Penggabungan Desa Terdampak Lumpur

oleh redaksiWD © 04/05/2023

BAGIKAN





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO (wartadigital.id) – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna dengan agenda pembacaan surat masuk bupati terkait Raperda Penggabungan Empat Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo dan pembentukan panitia khusus ke-18 yang akan menggodok raperda tersebut.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Usman serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Subandi.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo Hari Sucahyono membacakan surat surat masuk Bupati Sidoarjo pada 6 April 2023 dengan nomor surat 180/364/438.1.1.3/2023 tentang penyampaian rakerda tentang penggabungan desa di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo dan surat Bupati Sidoarjo 6 April 2023 nomor 180/365/384.1.1.3/2023 tentang penyampaian rakerda tentang penyetaraan gender.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi menjelaskan Menteri Dalam Negeri telah menetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.617 Tahun 2002 tentang pemberian dan pemutakhiran kode daftar wilayah administrasi pemerintah dan pulau dimana untuk kode desa terdampak lumpur Sidoarjo telah diatur dan dijadikan kode wilayah desa induk. Dengan pertimbangan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di lapangan serta ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.617 Tahun 2002.

Penggabungan ini harus segera diresmikan dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 2023 nomor 3061.13/2321/SY perihal percepatan rancangan peraturan daerah tentang penggabungan 4 desa terdampak lumpur Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo.

"Adapun wilayah yang menjadi objek raperda penggabungan adalah Desa Penjarakan, Desa Besuki Kecamatan Jabon, Desa Wonokromo Kecamatan Porong dan Desa Kedung Bendo Kecamatan Tanggulangin," sebut Subandi pada sidang paripurna rapat ke satu masa persidangan kedua di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (4/5/2023).

Pimpinan Sidang Paripurna H Usman mengatakan DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus (pansus) ke-18 tentang Raperda penggabungan desa terdampak lumpur Sidoarjo dan sudah terpilih sebagai Ketua Pansus ke-18 adalah Zamroni Mudhori. **sis**

